

Genjot Motivasi dan Asa Pendamping ;

Melalui Peningkatan Kapasitas



Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan ke depan secara umum difokuskan pada aktivitas pembangunan yang berpihak pada rakyat, tidak merusak, tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keseimbangan ekosistem yang dituangkan dalam program-program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2015-2019.

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, Kementerian LHK memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan seluas 12,7 juta hektar melalui kegiatan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan hutan adat. Untuk mencapai target tersebut diperlukan tenaga penyuluh kehutanan yang mendampingi masyarakat untuk mengoptimalkan aksesnya dalam pengelolaan hutan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Penyuluh Kehutanan pendamping kelompok pemegang ijin perhutanan sosial, pada tanggal 17 September 2018 Kepala Pusat Penyuluhan telah membuka secara resmi penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Pemegang Ijin Perhutanan Sosial yang diselenggarakan di Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh para Penyuluh Kehutanan sebanyak 50 orang yang berasal dari Prov. Kalimantan Selatan dan Prov. Kalimantan Tengah.



Penyelenggaraan kegiatan pelatihan ini merupakan yang kesekian kali dimana sebelumnya diselenggarakan oleh Pusat Penyuluhan BPPSDM di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Kadipaten dan BDLHK Rumpin. Kegiatan serupa juga telah diselenggarakan oleh Balai PSKL bekerjasama dengan beberapa BDLHK. Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan wujud keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mewujudkan ekonomi berkeadilan melalui penguatan kapasitas tenaga pendamping perhutanan sosial.

Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan dalam sambutannya yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan dan Perhutanan Sosial menyampaikan bahwa sampai dengan tahun 2018 akan berupaya memberikan akses kelola kepada masyarakat di dalam kawasan hutan sebesar 10% dari luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu \pm 170.000 hektar. Realiasi perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Selatan hingga saat ini seluas 28.236,52 hektar terdiri dari 12 Hutan Desa (HD), 19 Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan 16 Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Terdapat 373 Desa yang secara indikatif berada di dalam kawasan hutan. Terhadap desa – desa tersebut Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan akan memfasilitasi usulan Hutan Desa dengan luasan 500 ha per desa.

Salah satu faktor penting dalam pencapaian keberhasilan program perhutanan sosial adalah dengan optimalisasi peranan pendamping yang dalam hal ini dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan yang ada di KPH, sehingga fungsi Penyuluh Kehutanan sebagai fasilitator bisa membangun dan mengembangkan jejaring kerja perhutanan sosial mulai dari usulan, verifikasi sampai pendampingan pasca ijin.





Dalam kesempatan tersebut Kepala Pusat Penyuluhan dalam sambutannya menekankan pentingnya Pendampingan **“BERTEMAN”** yaitu **BER**bagi peran antara para pendamping baik Penyuluh Kehutanan PNS, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun tenaga pendamping lainnya, selanjutnya **TER**apkan kebersamaan, dan **MAND**iri hasilnya.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan ini selain penyampaian materi dalam kelas juga ada materi praktek yang akan diselenggarakan di Hutan Desa Nateh di Desa Nateh, Kec. Batang Alai Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah dengan luas HD \pm 1.507 Ha berdasarkan SK Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Nateh No: 2326/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 tanggal 21 April 2017.